**INTERVENSI PEMERINTAH MELALUI BANTUAN DALAM UPAYA PEMULIHAN EKONOMI PASCA COVID-19**

Shofiyatul Khoiriyah

Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura

[Shofiatulkhoiriyah03@gmail.com](mailto:Shofiatulkhoiriyah03@gmail.com)

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara terbesar yang ada di dunia dimana 2/3 wilayah indonesia merupakan lautan. Predikat negara kepulauan terbesar ini diakui dunia internasional dan tertuang dalam Konvensi PBB mengenai hukum laut (UNCLOS), yang telah disahkan pada tahun 1982 di Jamaica (Rusdiana *et al.*, 2021). Indonesia dikenal sebagai negara yang penuh dengan sumber daya alam yang melimpah, sumber kekayaan terbesar indonesia ini antara lain; hutan, perairan, bahan bakar fosil, serta bahan tambang lainnya (Kurniati *et al.*, 2020). Indonesia terletak diantara dua samudera yakni Pasifik dan Hindia, serta berada di pertemuan tiga lempeng tektonik dunia (Kurniawan, 2020). Hal inilah yang kemudian membuat indonesia menjadi jalur perdangangan serta alur lewatnya banyak hal di dunia, termasuk penyebaran Covid-19.

Corona virus atau yang biasa disebut dengan COVID-19 merupakan sejenis virus yang RNA-nya bersirkulasi pada hewan (zoonotik), namun pada akhirnya dapat menginfeksi manusia seperti halnya MERS dan SARS (Morfi, 2020). Penyakit ini pertama kali menyebar di kota Wuhan, Hubei, China, sebelum akhirnya menyebar di sekita dua ratus negara di seluruh dunia dan ditetapkan menjadi pandemi. Gejala dari efek serangan vius ini beragam dari ringan hingga berat seperti; kehilangan indra penciuman, diare, sakit tenggorokan, hingga kegagalan beberapa organ dalam tubuh. Virus ini biasanya menimbulkan efek atau gejala yang berat bagi orang yang memiliki penyakit bawaan (Siahaan, 2020).

Upaya penghambatan penyebaran virus ini menjadi tugas darurat dalam tiap negara di dunia. COVID-19 dapat menyebar melalui kontak langsung dengan penderita, dan penderita dengan gejala ringan kadangkala tidak menyadari bahwa mereka telah terinfeksi (Siahaan, 2020). Hal inilah yang kemudian membuat banyak pemimpin dunia memilih untuk membatasi seluruh kegiatan warganya, baik dalam negeri ataupun ke luar negeri. Pembatasan kegiatan ini disebut sebagai *social distancing / lockdown*. Hal ini telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Herdiana, 2019). Akibat banyak kegiatan yang harus dibatasi bahkan dihentikan, menyebabkan banyak negara mengalami penurunan kegiatan ekonomi hingga menyebabkan banyak keluarga yang terancam tidak tahan pangan. Hal ini terjadi karena banyaknya pegawai yang di PHK, dan usaha lainnya sepi pelanggan (Yamali and Putri, 2020).

**Rumusan Masalah**

Masalah yang akan dianalisis dalam tulisan kali ini adalah; bagaimana peran pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi di masyarakat utamanya masyarakat kelas menengah ke bawah, bagaimana cara pemerintah menyalurkan bantuan ekonomi tersebut, dan apakah hal tersebut telah mampu mengatasi permasalahan di masyarakat atau tidak.

**Tujuan**

Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui bagaimana campur tangan (intervensi) pemerintahan untuk mengatasi masalah ekonomi yang dialami masyarakat Indonesia. Selain untuk menambah pengetahuan penulis dan pembaca, tulisan ini juga dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas Ujian Akhir Semester Mata Kuliah Ekonomi Makro, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura.

**TINJAUAN PUSTAKA**

Indonesia merupakan negara maritim dimana lautan di Indonesia lebih besar dibandingkan daratannya. Indonesia merupakan salah negara yang letaknya berada di khatulistiwa, tepatnya di 6°LU (Lintan Utara) - 11°LS (Lintang Selatan) dan 95°BT (Bujur Timur) - 141°BT (Bujur Timur). Ditinjau secara geografis, Indonesia terletak diantara diantara 2 benua yaitu Asia dan Australia juga 2 buah samudera yakni Samudera Hindia dan Samudera Pasifik (Utomo and Purba, 2019). Hal inilah yang kemudian membuat Indonesia menjadi sangat stategis, karena dilintasi oleh jalur perdagangan dunia. Lokasi serta keadaan penduduk Indonesia membuat Indonesia menjadi salah satu pangsa pasar Internasional, utamanya dalam hal otomotif, makanan, dan minuman.

Kegiatan ekonomi merupakan proses produksi, distribusi, hingga konsumsi barang dan jasa. Pada awalnya manusia melakukan kegitan ekobnomi hanya dengan kegiatan saling menukar hasil prosduksi mereka. Seiring berkembangnya waktu, mereka mencari cara yang llebih efektif. Banyak hal menjadi kendala merekasaat itu, seperti; susahnya menemukan dua pihak yang memiliki ketergantungan satu sama lain hingga dapat saling menukar, ketidaksamaan ukuran dan jenis barang, menyebabkan manusia akhirnya memutuskan untuk menggunakan uang sebagai alat tukar yang sah. Pada akhirnya terdapat produsen, konsumen, dan distrubutor karena satu orang akan sangat sulit untuk mengemban ketiga tugas tersebut. Hal inilah yang kemudian membentuk sistem ekonomi dunia (Dasopang, 2020)

Pada awal tahun 2020 lalu, dunia dikejutkan dengan kemunculan virus baru di sebuah kota kecil di China. Virus ini awalnya terdeteksi ketika terdapat 44 orang yang mengalami pneumia akut dalam waktu yang hampir berdekatan di Wuhan, Hubei, Cina (Handayani *et al.*, 2002). Hal ini kemudian diidentifikasi bahwa hal itu karena penularan virus dari hewan ke manusia, karena memang wuhan terkenal pasar basahnya yang menjual bermacam daging dan hewan laut. Para penderita penyakit yang disebabkan oleh virus ini juga merupakan para pedagang di pasar Huanan (Nursofwa *et al.*, 2020).

Corona virus atau yang biasa disebut dengan COVID-19 merupakan sejenis virus yang RNA-nya bersirkulasi pada hewan (zoonotik), namun pada akhirnya dapat menginfeksi manusia seperti halnya MERS dan SARS (Morfi, 2020). Penularannya yang sangat cepat dan mudah membuat virus ini akhirnya menyebar ke seluruh penjuru dunia. Indikasi dari orang yang terpapar virus ini biasanya mengalami panas tinggi, gejala bersin, batuk, bahkan ada yang tidak menimbulkan gejala sama sekali. Bebagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi dan menghambat penyebaran virus ini, salah satunya adalah diberlakukannya *lockdown* dan pembatasan kegiatan sosial di seluruh dunia (Ariandra, 2021). Hal inilah yang kemudian membuat kegiatan ekonomi sulit dilakukan, terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran saat itu, hingga karyawan yang dirumahkan dengan catatan tidak bekerja sama dengan tidak digaji (Muslim, 2020).

Penghentian aktivitas karena COVID-19 tidak terbatas pada kegiatan ekonomi perusahaan dan perdagangan saja, namun juga bagi seluruh aspek yang ada Indonesia khususnya pariwisata. Seluruh kegiatan pariwisata di Indonesia harus ditutup dalam upaya pencegahan penyebaran virus, yang menyebabkan pendapatan negara dan masyarakat sekitar berkurang drastis (Dwina, 2020). Para pelaku usaha makanan dan minuman utamanya UMKM juga mengeluhkan hal yang sama. Pada malam hari, diberlakukan jam malam sehingga penjual seringkali pulang dengan sisa dagangan yang masih banyak (Iskandar, Possumah and Aqbar, 2020). Sehingga banyak sekali keluarga yang terancam tidak tahan pangan. Dalam hal ini, peran pemeintah dirasa perlu untuk mengatasi permasalahan krisis ekonomi di masyarakat pasca pandemi COVID-19. Para pelaku UMKM perlu dijadikan pihak yang harus diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah (Sari *et al.*, 2021).

**PENDEKATAN**

**Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode riset yang memberikan penjelasan berdasar hasil analisis dan bersifat subjektif. Peneliti menggunakan perspektif dari penelitian sebelumnya sebagai gambaran yang diutamakan dalam memperoleh hasil penelitian .

**Jenis Data**

Data yang diperoleh yaitu berupa dua jenis data, yakni primer dan sekunder. Data sekunder didapatkan melalui hasil kajian pustaka buku dan jurnal berstandar nasional. Data Primer didapatkan melalui observasi secara langsung permasalahan yang ada pada masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

**Teknik Pengumpulan**

Teknik pengumpulan data adalah melalui studi pustaka. Penulis mendapatkan data sekunder melalui buku dan jurnal yang memiliki standar nasional.

**PEMBAHASAN**

Dengan munculnya virus COVID-19, seluruh negara di dunia mencari cara untuk menghentikan penyebaran virus ini. Hal yang paling lazim dilakukan oleh pemerintah negara di dunia adalah pembatsan kegiatan sosial, yang tentunya berdampak juga terhadap kegiatan ekonomi. Banyaknya kegiatan ekonomi yang tidak berjalan, menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK), dan kayawan dirumahkan banyak terjadi (Hastuti, Harefa and Napitupulu, 2020). Dengan dibelakukannya pembatasan kegiatan, menyebabkan devisa negara berkurang utamanya dari sektor pariwisata. Diperkirakan sekitar 75 juta lapangan pekerjaan yang terdapat di sektor pariwisata berisiko kehilangan omset sebanyak 2,1 triliun US $ atau lebih (Utami and Kafabih, 2021).

Masyarakat kelas menengah kebawah utamanya pelaku UMKM terancam tidak tahn pangan karena kebangkrutan (Islami, Supanto and Soeroyo, 2021). Kementerian Koperasi dan UKM dalam sebuah data menjelaskan bahwa 98% usaha mikro (63 juta), sekitar 783 ribu usaha kecil, 60 ribu lebih usaha menengah dan 5 ribuan usaha besar terkena dampak pandemi Covid-19 sehingga penjualan turun dan pasokan bahan baku terganggu (Kecil *et al.*, 2008). Hal ini tentunya membuat ekonomi masyarakat menjadi tidak stabil dan terancam tidak tahan pangan.

Upaya yang dilakukan pemerintah adalah memberikan pelatihan bagi pelaku UMKM untuk membentuk suatu ekonomi kreatif, yang dilakukan secara *e-learning*. Salah satu bantuan lainnya dari pemerintah adalah dengan penyaluran bantuan sosial berupa kemitraan UMKM, penyerapan tenaga kerja untuk pembuatan masker kain, pemberian dukungan berupa bahan baku kepada pelaku UMKM, dan pemberian intensif pajak bagi pelaku UMKM. Hal lainnya adalah pemeberian keringanan kredit, dimana peminjam diberikan kelonggaran waktu dalam pembayaran hutang terhadap Bank jika memang ditujukan untuk berwirausaha. Hal ini sesuai dengan POJK No 48/POJK.03/2020 tentang perubahan atas POJK No. 11/POJK.03/2020 (Maharani and Jaeni, 2021).

Bantuan lainnya yang diberikan pemerintah kepada masyarakat kelas menengah kebawah sangat beragam. Mulai dari PKH, Kartu Sembako, dan lainnya. PKH adalah program bantuan yang berikan oleh pemerintah kepada keluarga miskin, dan telah dilaksanakan sejak tahun 2007. Namun pemerintah menambahkan penerima bantuan PKH sebesar 25%, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH bertambah hingga menjadi 10 juta KPM. Perubahan PKH juga terletak pada rentang penerimaan yang awalnya 4 bulan sekali menjadi setiap bulan yang disalurkan langsung (Rizki, 2021).

Kartu Sembako merupakan wajah baru dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diberikan tiap bulannya kepada KPM berupa bahan makanan. Hal ini bertujuan agar kebutuhan makann pokok KPM dapat terpenuhi dengan baik. Kenaikan anggaran dalam hal ini juga terjadi diamna mulanya bernilai Rp150.000 menjadi Rp200.000. Jumlah KPM juga bertambah menjadi 20 juta KPM. Bantuan ini diberikan selama sembilan bulan hingga Desember 2020.

Permerintah juga mempelakukan potongan harga tarif listik pasca bayar dan prabaya bagi masyarakat. Berlaku mulai April samapi dengan Desember 2020 untuk pelanggan listrik 450 Volt Ampere (VA) dan diskon 50% untuk pelanggan 900 VA. Bagi para pengguna dari rumah tangga yang mendapatkan subsidi dan terdata dalam DTKS di Kementerian Sosial, mendapatkan diskon sebesar 100%. Bagi pelanggan pascabaya, potongan akan langsung masuk, sedang bagi pelanggan prabayar akan dikenakan token gratis (Yuliantis and Kismatini, 2022).

Bantuan lainnya yan g paling sering kita dengar adalah BLT-DD. BLT-DD merupakan bantuan berupa uang yang berasal dari Dana Desa yang kemudian diberikan kepada keluarga miskin dan kesulitan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, utamanya bagi warga tedampak COVID-19. Masyarakat miskin yang menerima bantuan ini adalah mereka yang tidak termasuk penerima bantuan jaminan sosial lainnya (PKH, BPNT dan Kartu Prakerja). Nilai bantuan yang diperoleh dari BLT-Dana Desa sebesar Rp600.000 setiap bulannya bagi setiap keluarga (Sasuwuk, Lengkong and Palar, 2021).

**KESIMPULAN**

Virus coona atau yang biasa disebut sebagai COVID-19 adalah sebuah virus yang menyebabkan manusia menderita infeksi pernapasan mulai dari yang ringan hingga yang akut. Virus ini pertama kali ditemuka di sekitar pasar Huanan, Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Virus ini besifat zoonotik yakni menular dari hewan ke manusia. Karena penyebaran dan penularannya yang begitu mudah, pemerintah dari berbagai negara memutuskan untuk membatasi kegiatan untuk mencegah penulaan virus ini.

Pembatasan kegiatan yang dilakukan menyebabkan kegiatan ekonomi banyak negara mengalami penurunan. Hal ini membuat banyak keluarga yang kemudian terdampak secara ekonomi, dan terancam tidak tahan pangan khususnya di Indonesia. Hal inilah yang kemudian mendorong pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap ekonomi warganya agar tetap dapat bertahan di tengah pandemi.

Pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo kemudian berupaya untuk memberikan bantuan berupa peningkatan usaha UMKM melalui kursus kreatif secara online dan pemberian kredit usaha bunga rendah. Upaya lainnya yang diberiakn pemerintah adalah pemeberian bantuan sosial berupa BLT, PKH, diskon listrik, dan lainnya guna mendukung rakyatnya agar dapat bertahan di tengah krisis ekonomi setelah wabah COVID-19.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ariandra, A. (2021) ‘Covid-19: Epidemiologi, Virologi, Penularan, Gejala Klinis, Diagnsa, Tatalaksana, Faktor Resiko Dan Pencegahan’, *jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 3(November), pp. 653–660. Available at: http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPPP/article/download/83/65.

Dasopang, N. (2020) ‘Pola Kegiatan Perekonomian’, 1(2), pp. 1–20. Available at: https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/islamiccircle/article/view/397/331.

Dwina, I. (2020) ‘Melemahnya Ekonomi Indonesia Pada Sektor Pariwisata Akibat Dampak dari Covid-19’, *Jurnal Ekonomi*, 1, pp. 1–5. Available at: https://www.kompasiana.com/dewilst08/5ebcb675097f3659853413b3/ekonomi-indonesia-menanggung-beban-covid-19.

Handayani, D. *et al.* (2002) ‘Penyakit Virus Corona 2019’, *CPD Infection*, 3(1), pp. 9–12.

Hastuti, P., Harefa, D.N. and Napitupulu, J.I.M. (2020) ‘Tinjauan Kebijakan Pemberlakuan Lockdown, PHK, PSBB Sebagai Antisipasi Penyebaran Covid-19 Terhadap Stabilitas Sistem Moneter’, *Prosiding WEBINAR Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan*, V o l . 1, pp. 57–70. Available at: http://digilib.unimed.ac.id.

Herdiana, D. (2019) ‘Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB ) Sebagai Upaya Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19 )’, *Jurnal Kajian Ilmiah*, 2019.

Iskandar, A., Possumah, B.T. and Aqbar, K. (2020) ‘Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid-19’, *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(7). Available at: https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15544.

Islami, N.W., Supanto, F. and Soeroyo, A. (2021) ‘Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan UMKM yang Terdampak COVID-19’, *Jurnal Ekonomi*, 2(1), pp. 45–57.

Kecil, M. *et al.* (2008) ‘Pemanfaatan Teknologi Digital Untuk Pemberdayaan Usaha’, *Jurnal Ekonomi*, 1(7), pp. 91–95.

Kurniati, E. *et al.* (2020) ‘Identifikasi Kesiapsiagaan Guru PAUD sebagai Upaya Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Bandung’, *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(2), p. 840. Available at: https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i2.388.

Kurniawan (2020) *Dampak dan Penanganan Bencana Banjir Terhadap Kondisi Psikis Anak Usia Dini di Desa Meli Kabupaten Luwu Utara*, *file:///C:/Users/VERA/Downloads/ASKEP\_AGREGAT\_ANAK\_and\_REMAJA\_PRINT.docx*.

Maharani, H.C. and Jaeni, J. (2021) ‘Determinan Kebijakan Pemerintah Sebuah Solusi Keberlangsungan Usaha UMKM di Tengah Pandemi Covid-19’, *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 16(1), pp. 26–39. Available at: https://doi.org/10.31942/akses.v16i1.4469.

Morfi, C.W. (2020) ‘Kajian Terkini CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19)’, *Jurnal Ilmu Kesehatan Indonesia*, 1(1), pp. 1–8. Available at: https://doi.org/10.25077/jikesi.v1i1.13.

Muslim, M. (2020) ‘PHK pada Masa Pandemi Covid-19’, *ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis*, 23(3), pp. 357–370. Available at: https://www.worldometers.info/coronavirus.

Nursofwa, R.F. *et al.* (2020) ‘Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan’, *Inicio Legis*, 1(1), pp. 1–17. Available at: https://doi.org/10.21107/il.v1i1.8822.

Rizki, M. (2021) ‘Dampak Program Perlindungan Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Tengah Pandemi Covid-19’, *Jurnal Good Governance*, 17(2), pp. 125–135. Available at: https://doi.org/10.32834/gg.v17i2.335.

Rusdiana, D. *et al.* (2021) ‘Strategi Pembangunan Industri Pertahanan Pada Negara Kepulauan Guna Mendukung Pertahanan Negara’, *Jurnal Academia Praja*, 4(2), pp. 427–440. Available at: https://doi.org/10.36859/jap.v4i2.629.

Sari, N. *et al.* (2021) ‘Dampak Stimulus Pemerintah Untuk Umkm Pada Era Pandemi Covid-19’, *Journal of Business Administration Economic & Entrepreneurship*, 3(1), pp. 1–8.

Sasuwuk, C.H., Lengkong, F.D. and Palar, N.A. (2021) ‘Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sea Kabupaten Minahasa’, *Jurnal Academia Praja*, VII(108), pp. 78–89.

Siahaan, M. (2020) ‘Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Dunia Pendidikan’, *Jurnal Kajian Ilmiah*, 1(1), pp. 73–80. Available at: https://doi.org/10.31599/jki.v1i1.265.

Utami, B.A. and Kafabih, A. (2021) ‘Sektor Pariwisata Indonesia Di Tengah Pandemi Covid 19’, *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 4(1), pp. 383–389. Available at: https://doi.org/10.33005/jdep.v4i1.198.

Utomo, D.P. and Purba, B. (2019) ‘Penerapan Datamining pada Data Gempa Bumi Terhadap Potensi Tsunami di Indonesia’, *Prosiding Seminar Nasional Riset Information Science (SENARIS)*, 1(September), p. 846. Available at: https://doi.org/10.30645/senaris.v1i0.91.

Yamali, F.R. and Putri, R.N. (2020) ‘Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia’, *Jurnal Ekonomi*, 4(September), pp. 384–388. Available at: https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179.

Yuliantis, A. and Kismatini (2022) ‘Analisis Kepuasan Masyarakat Jenangan Terhadap Kebijakan Subsidi Listrik Di Masa Pandemi’, *jurnal kebijakan pemerintahan*, 5(1), pp. 39–45.